

Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |          |            |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas  | Sindo    | Tempo      |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

## Bisa Disebut Perbuatan Kriminal

### Fasos dan Fasum Milik Pemprov Kemungkinan Dijual Pengembang

JAKARTA—Lima wali kota dari wilayah administrasi DKI Jakarta dipanggil para wakil rakyat di Kebon Sirih, Rabu (29/5). Lima pembantu Gubernur Anies Baswedan, dipanggil oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk membahas persoalan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang belum diserahkan ke pemerintah provinsi oleh pengembang.

Dari hasil rapat tersebut terkuak, ada sejumlah fasos dan fasum yang dibeli lagi oleh dinas terkait. Harganya bahkan mencapai miliaran rupiah. Padahal aset itu sejatinya adalah milik Pemprov DKI Jakarta.

"Masalah aset berupa lahan di Pemprov DKI sudah sangat mengkhawatirkan, masa ada fasos fasum yang sudah menjadi milik pemprov dibeli lagi oleh dinas. Ini dapat disebut perbuatan kriminal yang sudah merugikan keuangan daerah. Kami akan laporkan kepada KPK, agar masalah ini dapat diungkap," tegas Koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, saat memimpin rapat di kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/5).

Kasus ini mengingatkan kembali pada lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang juga dibeli ulang oleh Dinas Perumahan seharga Rp 300 miliar dari tangan pengembang.

Jual beli lahan aset fasos fasum kata Taufik, terjadi di beberapa wilayah wali kota. Sayangnya, dalam rapat kali ini para wali kota tidak hadir dan hanya diwakili oleh pejabat terkait, seperti sekretaris kota, dan pejabat dari Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH).

Para perwakilan pun tidak menyiapkan data-data mengenai nama pengembang dan jumlah aset fasos fasum secara rinci. Sehingga diputuskan untuk melanjutkan rapat pada Jumat 31 Mei untuk memberi waktu tiap-tiap wilayah melengkapi data masing-masing. "Hari jumat kami minta data-datanya sudah lengkap semua, sehingga dapat langsung kita laporkan sama-sama ke KPK," kata Taufik.

Ditegaskan Taufik, keseriusan Komisi A membongkar persoalan aset ini bertujuan untuk membantu Gubernur Anies Baswedan, dalam upaya menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyelesaikan persoalan aset ■

Kendati Pemprov DKI memperoleh opini wajar tanpa pengecualias (WTP), namun BPK tetap menyertakan catatan-catatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. Di antaranya, berupa masalah aset. "Jadi kami bantu gubernur agar dapat segera menuntaskan ini (masalah aset)," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Timur Usmayadi, mengakui masih ada ratusan pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasos fasum kepada pemprov. Pihaknya berjanji menyerahkan data dan nama-nama pengembang tersebut kepada DPRD pada rapat lanjutan. "Kami akan kumpulkan dan serahkan datanya hari Jumat nanti," katanya.

Hal senada juga dikatakan Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Jakarta Utara Ardan Solihin. Menurutnya, salah satu pengembang yang belum menyerahkan fasos fasum di wilayah Jakarta Utara adalah Pantai Indah Kapuk (PIK). "Kami akan terus berusaha mendesak agar pengembang menyerahkan kewajiban fasos dan fasumnya," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Kontrol Korupsi (LKK) Agus Taufiqurohman juga menyoroti persoalan ini. LKK ucapnya mendesak masalah aset fasos dan fasum segera dituntaskan. "Kami mendesak Pemprov DKI segera menuntaskan masalah fasos fasum ini," ujar Agus, Selasa (28/5).

Agus mengatakan, masalah aset ini sudah menjadi temuan dari BPK. Sehingga sudah menjadi keharusan untuk ditelusuri dan diungkapkan. "Kami juga akan melaporkan masalah aset dan fasos fasum ini kepada KPK agar ikut turun tangan menuntaskan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk mempercepat inventarisasi aset tetap pada tahun ini.

Ia menuturkan, selama ini BPAD DKI Jakarta mengandalkan aplikasi Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) untuk mencatat hasil dari inventarisasi aset tersebut. "Kita dorong agar cepat selesai tahun ini. Karena dulu aset belum tercatat dengan baik. Saat ini pencatatannya akan diperbaiki," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/5).

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD DKI Jakarta, Pujiono menjelaskan, sampai kini, pihaknya telah mencatat aset tetap senilai Rp 436 triliun dari 725 entitas ekuitas yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari jumlah itu, masih ada lima hingga enam persen aset tetap yang belum diinventarisasi. "Sekarang mau kita genjot agar sampai 100 persen. Karena BPK juga minta cepat diselesaikan," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta juga akan memanggil wali kota dari lima wilayah di ibu kota. Mereka akan ditanya mengenai progres penagihan fasos dan fasum, dari para pengusaha atau pengembang yang belum menyerahkan kewajibannya.

Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Michael Rolandi pun mengatakan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memiliki jumlah aset yang sangat besar dan tersebar.

Pemprov DKI Jakarta memiliki total aset senilai Rp 436 triliun yang tersebar di seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Itu besar sekali. Kalau enggak ada pengelolaan cashless akan menyulitkan saat menyusun laporan keuangan," ujar Michael.

Terkait permasalahan fasos dan fasum, Pemprov DKI Jakarta pun saat ini menempatkan wewenang penagihan fasos dan fasum kepada wali kota dan bupati agar prosesnya lebih cepat.

Persoalan dari penagihan fasos dan fasum pun beragam. "Kadang pengembangnya sudah susah dicari ini dari



Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |          |            |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas  | Sindo    | Tempo      |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

## Bisa Disebut Perbuatan Kriminal

tahun 1971, saya pernah telusuri dari 2012. Kadang dokumen SIPPT-nya enggak ada, pengembangnya sudah enggak ada," tutur Michael, Rabu (15/5). Michael pun masih belum mengetahui berapa nilai aset fasos dan fasum yang belum tertagih.

Sekadar diketahui BPK DKI Jakarta menemukan beberapa permasalahan dari LKPD 2018 tersebut. Meski demikian, perlu dicatat bahwa permasalahan tersebut tidak berpengaruh pada kewajaran atas penyajian LKPD. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh BPK DKI Jakarta antara lain pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap yang belum selesai, masih adanya aset fasos dan fasum yang diserahkan oleh Pemprov DKI Jakarta tetapi masih dimanfaatkan pengembang.

Sebaliknya, masih ada juga aset fasos atau fasum yang sudah selesai dibangun dan digunakan oleh pengembang tetapi belum diserahkan kepada Pemprov DKI. Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang anggarkan pun masih banyak yang berada di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan oleh penerima. (wok)

